

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa:

1. Berdasarkan analisis jawaban responden, *value for money* terletak pada kriteria yang baik dengan skor 84,0%. Kemudian berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa secara parsial *value for money* berpengaruh tidak signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Boalemo.
2. Berdasarkan analisis jawaban responden, pengawasan terletak pada kriteria yang baik dengan skor 77,7%. Kemudian berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa secara parsial pengawasan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Boalemo.
3. Berdasarkan analisis jawaban responden, akuntabilitas terletak pada kriteria yang sangat baik dengan skor 84,6%. Kemudian berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Boalemo.
4. Berdasarkan analisis jawaban responden, pengelolaan keuangan daerah terletak pada kriteria yang baik dengan skor 84,0%. Kemudian berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa

secara simultan *value for money*, pengawasan dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Boalemo. Hasil ini dibuktikan dengan koefisien determinasi sebesar 18,4%.

## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Hasil *value for money* yang bernilai positif meskipun tidak signifikan sehingga pemerintah Kabupaten Boalemo harus meningkatkan hal-hal yang terkait dengan *value for money* (ekonomi, efisiensi, efektivitas dan outcome) dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak menjalankan program yang kurang jelas, kemudian harus melakukan penetapan anggaran sesuai dengan kepentingan masyarakat publik.
2. Sebaiknya pemerintah tidak menekan sikap demokrasi dari pengawas dalam hal melakukan pengawasan terkait dengan kinerja keuangan pemerintah. Misalnya DPRD terus mengawasi program-program beserta capaian program tersebut.
3. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Boalemo terus meningkatkan akuntabilitas publik terkait dengan keuangan daerah. Langkah yang harus dilakukan yakni dengan memelihara sistem manajemen keuangan daerah yang menjadi sebuah objek sistem yang digunakan

dalam mengembangkan akuntabilitas pemerintah publik daerah Kabupaten Boalemo.

4. Sebaiknya dalam pengelolaan keuangan perlu untuk ditingkatkan. Terutama dalam hal pencapaian anggaran pendapatan asli daerah. Langkah yang dapat dilakukan yakni dengan pembangunan yang merata agar sumber-sumber PAD dapat dikelola dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afsita Meri. Khairani Siti. 2010. *Analisis Value For Money dan Akuntabilitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Pdam Tirta Musi*. STIE MDP. Palembang.
- Anugriani Mulya. 2014. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah Di Kabupaten Bone*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Baswir, Revrison. 1999. *Ekonomi kerakyatan Ekonomi Rakyat Dan Kooperasi Sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Coryanata Isma. 2010. *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Universitas Bengkulu.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: Indeks..
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Badan. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Halim, Abdul. 2007 *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah*. Upps-STIM YKPN : Yogyakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2001. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta : UPP AMP YKPM
- Kutamaya, Giani. 2007. *Pengaruh Value for money terhadap Akuntabilitas Publik daerah air minum (pdam) Kota bandung*. *Skripsi*. Unikom.
- Mahmud, Fiktor. 2013. *Pengaruh Value For Money Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Pada Kantor DPPKAD Kabupaten Gorontalo)*. *Skripsi*. Universitas Negeri Gorontalo.

- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Ykpn Yokyakarta.
- Mahsun, Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*,. Penerbit BPF, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2003. *Akuntansi Sektor Publik, Andi Offset*, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik, Andi Offset*, Yogyakarta.
- Narimawati, Umi. 2007. *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Agung Media.
- Rasyid, M. Ryaas. 2001. *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru*, Jakarta : Yarsif Watampone
- Riduwan. 2004. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Alfabeta Bandung.
- Santoso, Singgih. 2012. *Analisis SPSS pada Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Sari, Erna. Saiful dan Nila Aprilia. Pengaruh pemahaman sistem akuntansi pemerintahan dan penatausahaan keuangan daerah terhadap kinerja Pengelola keuangan daerah. *Jurnal Fairness Volume 3, Nomor 3, 2013: 19- 29*
- Sri Dewi Anggadini. 2010. Pengaruh Value for money Terhadap Akuntabilitas Publik. *Skripsi*. Universitas Komputer Indonesia.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa
- Sumarsono, Sony. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Graha Ilmu Yogyakarta.
- Suparno. 2011. Pengaruh *Value for money*, Akuntabilitas Keuangan daerah, transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah (Studi kajian Pada Pemerintah Kota Dumai). *Skripsi*. USU.
- Suprihartini Lia. 2013. Analisis Pengaruh Pelaksanaan Manajemen Publik Melalui Pengukuran *Value For Money* dan Karakteristik

Pemerintah Daerah Terhadap Penggunaan Belanja Modal di Provinsi Kepulauan Riau. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Riau.

Terry, Leslie W. 2005. *Dasar – Dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 pasal 3 tentang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah